

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Sinta Yulia Permatasari^{1*}, Andri Prastiwi²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

¹sisintayulia@gmail.com, ²andriprastiwi@lecturer.undip.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 15 Mei 2023

Disetujui : 4 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

The anti-corruption program is the company's initial defense strategy against corruption. Therefore, the disclosure and transparency of these programs is a commitment in illuminating corruption and improving the ethical behavior of management, employees, partners, agents and other related parties of the company. This study aims to analyze the effect of company characteristics and the board of commissioners on corporate anti-corruption disclosures. The research objects are manufacturing sector companies listed on the IDX in 2020 and 2021. The sampling method is purposive sampling with a sample of 100 companies. Data collection uses research instruments, data analysis is quantitative/statistical in nature with the aim of testing the established hypotheses. Methods of data analysis using SPSS version 25.0. This study found that company size, company age, net profit margin, and board of commissioners have a positive effect on anti-corruption disclosure.

Keywords: *Anti-corruption Disclosure, Company Characteristics, Board of Commissioners, Manufacturing Companies*

PENDAHULUAN

Korupsi dalam korporasi telah menjadi isu penting dalam perdebatan akademis dan masyarakat umum. Isu korupsi layak masuk dalam konstitusi bukan hanya karena termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, tetapi juga karena menjadi isu yang tak akan pernah berakhir untuk diberantas. Hal ini didukung dengan data yang dikeluarkan oleh ACFE tahun 2016 menunjukkan bahwa penyelewengan asset dan korupsi merupakan kegiatan *fraud* yang paling sering dilakukan perusahaan. Korupsi yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan distorsi pasar dan insentif, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial (Karim et al., 2016).

Korupsi dapat menyebabkan rusaknya perkembangan ekonomi, dan menghilangkan akuntabilitas. Untuk mengurangi tingkat korupsi, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan berbagai peraturan. Indonesia adalah negara yang diatur oleh tiga lembaga terkemuka yang mempromosikan program anti korupsi diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan *Transparency International Indonesia* (TII). Pemerintah Indonesia dan otoritas pengatur lainnya berkomitmen untuk memerangi anti korupsi dan penyuapan. Meski KPK dan ICW sudah lama berdiri, namun kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum memuaskan (Faisal et al., 2022).



Sistem anti korupsi merupakan sistem untuk mencegah dan menanggulangi tindak korupsi. Dalam tingkat perusahaan sistem tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan suap atau tindakan korupsi yang akan dilihat pada tingkat pengungkapan sistem tersebut. Fenomena yang ditemui pada studi-studi sebelumnya bahwa lingkungan bisnis mempunyai pengaruh pada tingkat pengungkapan dari sistem anti korupsi yang ada. Diantaranya adalah ukuran perusahaan. Tindakan korupsi dapat berbeda dengan ukuran perusahaan dimana ukuran perusahaan menjadi sebuah tolak ukur kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan korupsi tersebut (Sullivan et al., 2013).

Beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan anti korupsi disuatu perusahaan ialah karakteristik perusahaan dan jumlah dewan komisaris. Menurut Sidharta dan Christanti (dalam Permanasari & Suhardjanto, 2014) Karakteristik perusahaan diartikan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha. Karakteristik perusahaan yang muncul karena adanya perbedaan kegiatan operasional dan faktor lain yang berasal dari dalam perusahaan. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi dalam laporan tahunan secara sukarela. Karakteristik perusahaan mendapat perhatian penting dalam penelitian tersebut karena peneliti berangkat bertitik tolak dari pemikiran bahwa sejauh mana pengungkapan sukarela oleh perusahaan sangat tergantung pada perbandingan antara biaya dan manfaat pengungkapan anti korupsi, dan perbandingan biaya manfaat tersebut akan sangat ditentukan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi, karakteristik perusahaan yang dimaksud antara lain ukuran perusahaan, umur perusahaan dan *rasio nett profit margin*. Hal tersebut seperti tertuang pada penelitian Tirtasari & Hartomo, (2019), Faisal et al., (2022) dan Novalia, (2021) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi. Berbeda dengan penelitian Wighrayani & Sapari, (2019), Erawati et al., (2018), dan Zulfi, (2014), yang tidak menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dan pengungkapan csr.

Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih kuat, maka diharapkan lebih memiliki sistem anti-korupsi yang rumit serta lebih menunjukkan komitmen dan tidak melakukan korupsi, juga memiliki hubungan dengan suatu profitabilitas dan perkembangan dari sebuah entitas tersebut (Andrés et al., 2021). Ukuran perusahaan menjadi bagian dari karakteristik perusahaan menjadi sebuah contoh bahwa dengan berkembangnya perusahaan yang kecil menjadi besar dibutuhkan juga suatu kebijakan yang lebih rumit menata bisnisnya.

Karakteristik perusahaan selanjutnya ialah umur perusahaan. Perusahaan yang memiliki umur lama cenderung akan mengelola informasi akuntansi lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri, sehingga perusahaan dengan umur yang lama akan memberikan informasi CSR yang lebih banyak dan dapat diandalkan (Dewi & Muslih, 2018).

Karakteristik perusahaan berikutnya yakni *rasio nett profit margin*. Menurut Koloay et al., (2018), NPM merupakan hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah mendapatkan profit untuk kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai profit yang diinginkan, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional perusahaan pasti menimbulkan dampak bagi sosial dan lingkungan. Diharapkan semakin tinggi profit yang didapatkan, maka semakin banyak pula kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya pengungkapan anti korupsi. Konteks ini tidak didukung oleh Aruan et al., (2021) yang mengungkapkan tidak ada hubungan pengaruh antara NPM terhadap pengungkapan csr.

Keberadaan dewan komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas *fiduciary* untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 115 ayat 1, disebutkan bahwa tanggung jawab dewan komisaris yaitu menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris dipercaya dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik pengungkapan anti korupsi demi mewujudkan *good corporate governance* dan operasional perusahaan yang bersih dan sehat

bebas korupsi. Adanya dewan komisaris memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses operasi perusahaan

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan anti korupsi seperti yang dilakukan Hartomo & Hutomo, (2020) membuktikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris suatu perusahaan memiliki, semakin besar kekuatan komisaris untuk membawa tekanan manajemen keterbukaan dan transparansi informasi perusahaan. Dengan kata lain, ukuran perusahaan yang lebih besar akan menyebabkan proses monitoring menjadi lebih banyak efektif, yang mengkondisikan perusahaan untuk berbagi informasi perusahaan. Untuk sebuah perusahaan, kebijakan antikorupsi harus menjadi bagian dari pengungkapan anti korupsi yang mencerminkan transparansinya. Dewan komisaris memiliki dampak positif pada pengungkapan sosial perusahaan, termasuk pengungkapan kebijakan antikorupsi. Jumlah yang lebih banyak dari dewan komisaris akan meningkatkan komitmen terhadap kebijakan antikorupsi, pembinaan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Semakin signifikan sejumlah dewan komisaris juga memberikan dukungan aktif untuk pelaksanaannya dan kepatuhan terhadap kebijakan etika bisnis, termasuk aktivitas antikorupsi. Novalia, (2021) dan Febriansyah, (2020) membuktikan tidak adanya pengaruh antara jumlah dewan komisaris dan pengungkapan anti korupsi. Hasil berbeda ditunjukkan Tirtasari & Hartomo, (2019) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara dewan komisaris dan kecenderungan kebijakan pengungkapan anti korupsi.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu kelompok industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kondisi ekonomi sekarang yang telah berubah memberi banyak pengaruh pada dunia usaha antaranya para investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di perusahaan go public. Kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan para investor menilai investasi dalam pasar modal memiliki risiko yang tinggi dan ini memberi dampak terhadap perusahaan manufaktur yang mempunyai jumlah emiten yang terbesar terdaftar di BEI. Maka, dengan adanya pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan, diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Untuk itu, perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga dapat lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah.

Laporan perusahaan adalah informasi yang menghubungkan antara perusahaan yang *go public* di bursa efek dengan para investor. Laporan tersebut dapat berupa laporan keuangan saja maupun laporan tahunan. Laporan tahunan berisi kondisi keuangan perusahaan dan informasi-informasi lain yang akan dikomunikasikan kepada pemegang saham, kreditur, *shareholder*, calon *shareholder*, dan pihak lainnya yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini berlandaskan penelitian Dewi & Muslih, (2018) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada perusahaan manufaktur pada periode tahun 2020 dan 2021, pengungkapan tanggungjawab sosial untuk penelitian Dewi & Muslih, (2018) sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan anti korupsi. Penelitian ini juga menambahkan variabel independen yaitu *Nett Profit Margin*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, *nett profit margin* dan dewan komisaris terhadap pengungkapan anti korupsi.

STUDI LITERATUR

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan konsep dari legitimasi organisasi. Legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas membangun kesesuaian dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat dimana entitas berada. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya tergantung dilihat dari aktivitas operasinya apakah telah sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat (Wiyuda & Pramono, 2017).

Perusahaan perlu mewaspadaai adanya ancaman dari masyarakat sebagai akibat dari aktivitas perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Teori legitimasi

juga memfokuskan perusahaan pada interaksi terhadap masyarakat, sehingga sebuah organisasi mampu untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut (Mudjiyanti & Maulani, 2017).

Teori Agency

Suatu pandangan yang dibangun melalui teori agensi adalah anggapan mengenai sikap individualistis pada setiap orang yang akan memicu perbedaan kepentingan antara principal dan agent (Yulio, 2016). Teori Keagenan menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan dalam bentuk GCG, mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi untuk meredakan perbedaan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Karena dengan adanya implementasi GCG di perusahaan, pengawasan menjadi lebih ketat dan independensi dalam pengambilan keputusan dapat terjaga.

Pengungkapan Anti Korupsi

Pengungkapan (*disclosure*) mempunyai arti tidak menutupi atau menyembunyikan dan apabila dikaitkan dengan data, disclosure memberi arti memberikan informasi yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Pengungkapan anti korupsi adalah sebuah Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dalam memerangi korupsi. Pengungkapan terhadap social, ethical, environment dan sustainability sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada stakeholder (Murwaningsari, 2009).

Isu korupsi menjadi topik paling penting dalam aspek sosial di lingkungan sosial perusahaan, karena permasalahan korupsi dapat mengakibatkan permasalahan dalam perusahaan serta berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan di dorong untuk menerapkan strategi dalam memerangi kegiatan anti korupsi (Hills et al., 2009). Tiga institusi teratas di Indonesia yang menjadi pelopor dalam menangani kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (Gunawan & Joseph, 2017).

Praktik Anti Korupsi

Praktik anti korupsi merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh regulator untuk mengurangi tingkat korupsi (Healy & Serafeim, 2016). Setiap negara telah memiliki Undang-Undang dan peraturan hukum terkait praktik antikorupsi. Melaporkan kegiatan anti korupsi memberikan sinyal bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan mereka mengakui konsekuensi negative yang dapat mempengaruhi reputasi, integritas, dan legitimasi mereka jika mereka terlibat dalam korupsi (ACCA, 2008). Transparansi dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi terkait praktik antikorupsi perusahaan. Pengungkapan antikorupsi perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi terkait isu korupsi yang berkembang di sektor korporasi. Dampak positif yang timbul dari pengungkapan yang luas dapat meningkatkan transparansi guna mempertahankan nama baik perusahaan atas isu korupsi yang berkembang di dalam perusahaan (Krishnamurti et al., 2018).

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha (Sembiring, 2012). Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan dan rasio profitabilitas yaitu NPM (*Nett Profit Margin*).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan investor, sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar agar kredibilitas perusahaan senantiasa terjaga baik (Nasir et al., 2014). Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aset yang besar, jumlah karyawan yang banyak, penjualan tinggi, dan memiliki struktur kepemilikan yang lengkap. Perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar mempunyai sumber daya lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal (Sari & Marsono, 2013).

Umur Perusahaan

Umur perusahaan diukur dari *first issue* perusahaan tersebut di BEI hingga tahun penelitian. Irawan (2006) menyatakan perusahaan yang berumur lebih tua dikatakan memiliki lebih banyak pengalaman dan kemampuan dalam mengungkapkan informasi karena mereka telah mengerti kebutuhan informasi apaapa saja yang dibutuhkan oleh pemakai laporan tahunan.

Nett Profit Margin

Tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan diukur dengan menggunakan rasio *net profit margin* (NPM). *Nett Profit Margin* (NPM) atau disebut rasio profitabilitas, rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Semakin tinggi NPM menunjukkan semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba (Ningsih, 2018).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Akan tetapi dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Sedangkan menurut Sembiring, (2005) ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Berdasarkan ketiga definisi dewan komisaris di atas menunjukkan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

Pengaruh dari tata kelola perusahaan dalam hal ini diukur dengan jumlah dewan komisaris terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor Tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, mayoritas penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan anti korupsi oleh perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi

Ukuran perusahaan diduga turut menentukan tingkat kepercayaan investor, sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar agar kredibilitas perusahaan senantiasa terjaga baik (Nasir et al., 2014). Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aset yang besar, jumlah karyawan yang banyak, penjualan tinggi, dan memiliki struktur kepemilikan yang lengkap. Perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar mempunyai sumber daya lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal (Sari & Marsono, 2013).

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dituntut untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, perusahaan dengan jumlah aset yang besar memiliki sumberdaya yang besar pula akan memenuhi biaya yang terkait dengan pengungkapan anti korupsi. Perusahaan besar juga menjadi sorotan masyarakat sehingga perusahaan terdorong untuk memberikan tanggungjawab sosialnya dengan cara melakukan praktik pengungkapan antikorupsi. Berdasarkan penelitian Mulyono & Raharja, (2023), Faisal et al., (2022) dan Novalia, (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

Pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi

Perusahaan yang berumur lebih tua dikatakan memiliki lebih banyak pengalaman dan kemampuan dalam mengungkapkan informasi karena mereka telah mengerti kebutuhan informasi

apa saja yang dibutuhkan oleh pemakai laporan tahunan (Irawan, 2006). Perusahaan yang sudah berdiri sejak lama diduga memiliki sistem tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang lebih matang dan memiliki upaya mitigasi korupsi yang lebih baik pula. Merujuk pada teori legitimasi, bahwa legitimasi sebuah perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Apabila perusahaan dapat bertahan lama, maka semakin banyak informasi pengungkapan anti korupsi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan, sehingga legitimasi dapat disebut sebagai sumber potensial bagi perusahaan dalam bertahan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Muslih, (2018) memberikan bukti bahwa umur perusahaan yang memiliki umur tua dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*. Semakin tua umur dari sebuah perusahaan maka peluang perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR salah satunya pengungkapan anti korupsi semakin tinggi dan mudah, hal tersebut karena perusahaan dengan umur yang tua dianggap lebih mengetahui informasi apa saja yang harus diungkap dalam laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan dapat memberikan timbal balik yang positif bagi perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh Febriansyah, (2020) adanya pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

Pengaruh *Nett profit margin* terhadap pengungkapan anti korupsi

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan dengan membandingkan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Kasmir, 2014). Semakin tinggi NPM pada suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba.

Sesuai teori legitimasi semakin tinggi profit perusahaan, maka menunjukkan ketersediaan dana yang lebih untuk melaksanakan dan mengungkapkan anti korupsi. Meningkatnya keuntungan perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan salah satunya pengungkapan anti korupsi. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi (NPM) lebih memiliki dorongan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mengungkapkan kebijakan antikorupsi sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pernyataan itu didukung oleh Yubiharto & Hastuti, (2020) dan Wetik & Andayani, (2015) sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Nett profit margin* berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan anti korupsi

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada pihak manajemen perusahaan. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berada dalam perusahaan, ukuran dewan komisaris cenderung memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan.

Merujuk pada teori agensi, dengan melaporakan laporan keuangan secara lengkap maka akan meminimalisir masalah antara manajer dengan pemegang saham perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa dewan komisaris sebagai pelaksana tertinggi dalam perusahaan yang berperan mengawasi manajemen dapat memberikan pengaruh terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan salah satunya pengungkapan anti korupsi. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris diduga dapat memotivasi serta mendorong perusahaan untuk dapat lebih kuat dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Pernyataan ini didukung pada penelitian Tirtasari & Hartomo, (2019), dan Sembiring, (2005), sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Populasi merupakan sekumpulan keadaan atau objek yang setidaknya memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 - 2021. Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2016). Kriteria dalam pengambilan sampel yang disusun oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta mengeluarkan laporan tahunan (Annual Report) yang lengkap selama periode penelitian 2020 dan 2021.
2. Menyediakan informasi laporan tahunan (*Annual Report*) yang dapat di akses melalui website BEI (www.idx.co.id) maupun website resmi masing – masing perusahaan.
3. Perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi di tahun pengamatan.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI	195
Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan tahunan (<i>Annual Report</i>) 2020 dan 2021	(30)
Menyediakan informasi terkait variabel penelitian yang dapat di akses melalui websit BEI (www.idx.co.id) maupun website resmi masing – masing perusahaan	(40)
Perusahaan yang mengungkapkan kebijakan antikorupsi ditahun 2020 dan 2021	(75)
Total Sampel	50 x 2 =100

Sumber : Berbagai sumber yang telah diolah, 2023

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 data observasi pada perusahaan manufaktur. Lalu diuji menggunakan uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokolerasi. Hasilnya tidak ditemukan adanya gejala dari masing-masing uji tersebut. Data dalam penelitian ini termasuk dalam data panel yaitu data yang terdiri dari cross section dan time series yaitu terdiri dari 50 perusahaan dalam periode tahun 2020 dan 2021. Nilai adjusted R Square sebesar 0,607 berarti variabel independen dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen sebesar 60,7% sedangkan sisanya sebesar 30,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian

Pengungkapan Anti Korupsi

Menurut (Joseph et al., 2016) untuk mengukur sejauh mana pengungkapan anti korupsi terdapat Indeks yang digunakan terdiri dari 7 tema umum dengan 40 sub kategori yang dikelompokkan menjadi tujuh tema. Berikut ini adalah ketujuh tema yang dimaksud :

1. Pengungkapan akuntansi untuk memerangi penyuaipan;
2. Pengungkapan tanggung jawab dewan dan manajemen senior;
3. Membangun sumber daya manusia untuk memerangi suap;
4. Hubungan bisnis yang bertanggung jawab;
5. Verifikasi dan penjaminan eksternal;
6. Kode etik; dan
7. *Whistle-blowing*

Perhitungan item informasi diberi skor numerik berbeda basis dikotomi yaitu setiap item pengungkapan anti korupsi yaitu dengan cara memberikan skor “0” untuk setiap item yang tidak diungkapkan dan memberi skor “1” untuk setiap item yang diungkapkan dalam *annual report* perusahaan. Rumus dan item yang digunakan dalam penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian (Karim et al., 2017) adalah sebagai berikut:

$$ACDI = \frac{X}{N}$$

Dimana :

ACDI = Indeks Pengungkapan Anti Korupsi

X = 1 jika item diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan.

N = Jumlah maksimal item yang harus diungkapkan

Ukuran Perusahaan

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat digambarkan dengan ukuran perusahaan (size). Untuk mengukur ukuran perusahaan, menggunakan logaritma dari total aset (Faisal et al., 2022); (Januarti, 2019) Untuk mengukur karakteristik perusahaan menggunakan ukuran perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset}$$

Umur Perusahaan

Untuk mengukur karakteristik perusahaan menggunakan umur perusahaan sebagai berikut :

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Perusahaan Berdiri}$$

Nett Profit Margin

Untuk mengukur karakteristik perusahaan menggunakan rasio profitabilitas NPM (Nett Profit Margin) sebagai berikut :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan}}{\text{Total Penjualan}}$$

Dewan Komisaris

Untuk mengukur variabel dewan komisaris menggunakan jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan pada periode penelitian.

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

TEKNIK ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Terkait dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka untuk menguji kelayakan model regresi yang di gunakan perlu dilakukan pengujian yang memenuhi persyaratan uji asumsi klasik (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Apabila signifikansi nilai Kolmogrov-

Smirnov 0,05 maka data residual terdistribusi normal, sebaliknya untuk signifikan; kurang dari 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik terjadi jika tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya atau yang terbebas dari gejala multikolonieritas. Keberadaan multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2018).

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model dikatakan

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Durbin-Watson. Dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi, jika $du < d < 4 - du$, dimana 'd' adalah koefisien durbin watson, dan "dU" adalah nilai yang diambil dari tabel durbin watson pada 'n' sampel dan α signifikansi 5% (Wahyudin, 2015:143).

Uji Model Penelitian

Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	: Pengungkapan Anti Korupsi
X ₁	: Variabel Ukuran Perusahaan
X ₂	: Variabel Umur Perusahaan
X ₃	: Variabel Nett Profit Margin
X ₄	: Variabel Dewan Komisaris
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi
e	: error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Untuk melihat seberapa besar kontribusi atau kombinasi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui adjusted R square (Ghozali, 2011). Nilai R² adalah antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai koefisien determinasi (R²) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Model F

Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan atau taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan ketentuan:

- Apabila F hitung > F tabel Sig < α maka: H₀ ditolak, H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila F hitung > F tabel Sig < α maka: H₀ diterima, H_a ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis T

Untuk menentukan penerimaan atau penolakan didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05 dengan kriteria pengujian menurut (Ghozali, 2018) :

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig < 0,05 maka H₀ ditolak yang artinya salah satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau sig > 0,05 maka H₀ diterima yang artinya salah satu variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	ACDI	SIZE	UP	NPM	DK
Valid	100	100	100	100	100
Mean	0.6497	28.7043	40.00	0.0738	4.1200
Std. Deviation	0.09429	2.04513	20.612	0.06308	1.92422
Minimum	0.45	24.11	7	0.00	2
Maximum	0.88	33.54	108	0.34	10

Sumber : Output SPSS 2023

Rata-rata praktik pengungkapan anti korupsi sebesar 0,6497 dengan nilai minimum 0,45 dan maksimum 0,88. Hal ini menunjukkan perusahaan masih kurang dalam usaha memberantas korupsi. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,7043 dengan nilai minimum 24,11 dan maksimum 33,54. Hal ini menunjukkan objek penelitian memiliki skala perusahaan yang beragam. Rata-rata jumlah dewan komisaris 4 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 10. Rata-rata umur perusahaan telah berdiri sejak 40 tahun yang lalu, nilai minimum 7 tahun dan paling tua berusia 108 tahun. NPM rata-rata 0,0738, nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,34.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas

N		Skewness		Kurtosis	
Statistik	Statistik	Std Error	Statistik	Std Error	
100	0,010	0,241	-0,216	0,478	

Sumber : Olahdata SPSS, 2023

Hasil olahdata pada tabel 3. uji normalitas menunjukkan bahwa hasil nilai Z statistik skewness sebesar $0,010/0,241 = 0,0415$ dan Z Kurtosis $-0,216/0,478 = -0,4519$. maka dapat dipastikan nilai Zskewness dan Zkurtosisi kurang dari $\pm 1,96$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah memenuhi syarat dan asumsi uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
(X1) Ukuran Perusahaan	0,509	1,963	Tidak Terdapat Multikolinearitas
(X2) Umur Perusahaan	0,824	1,213	Tidak Terdapat Multikolinearitas
(X3) Nett Profit Margin	0,933	1,071	Tidak Terdapat Multikolinearitas
(X4) Dewan Komisaris	0,563	1,775	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Olahdata SPSS, 2023

Model persamaan dikatakan lolos asumsi multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebesar < 10 . Hasil diatas menunjukkan bahwa semua variabel sudah memenuhi kedua kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	
1 (Constant)	0,186	0,103	0,073
(X1) Ukuran Perusahaan	-0,005	0,004	0,217
(X2) Umur Perusahaan	0,000	0,000	0,449
(X3) Nett Profit Margin	0,004	0,097	0,965
(X4) Dewan Komisaris	0,005	0,004	0,231

a. Dependent Variabel : ABS_RES
Sumber : Olahdata SPSS, 2023

Output tabel 5 menunjukkan bahwa keseluruhan nilai signifikansi berada pada taraf $\geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter (koefisien) regresi akan terganggu.

Uji Autokolerasi

Tabel 6. Uji Autokolerasi menggunakan Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin-Watson
1	0,661 ^a	0,620	0,593	0,29167	1,962

Sumber : Olahdata SPSS, 2023

Hasil SPSS pada uji autokolerasi durbin-watson memperoleh angka 1,962 diketahui bahwa nilai tabel durbin-watson pada n 100 dan K4 diperoleh angka dL1,5922, dU 1,7582, DW 1,962 dan 4-dU 2,2418. syarat tidak terjadi autokolerasi positif ataupun negatif adalah nilai $dU < dW < 4-dU$ sedangkan nilai penelitian ini diperoleh $1,7582 < 1,962 < 2,2418$ sehingga menunjukkan tidak terjadi autokolerasi positif ataupun negatif.

Uji Model Penelitian Model Persamaan

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	.694	.141	.000
SIZE	.802	.725	.005
UP	.220	.151	.000
NPM	.045	.156	.001
DK	.509	.805	.018

Dependent Variable: ACDI
Sumber : Output SPSS 2023

Hasil SPSS pada analisis linear berganda pada tabel 7 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,694 + 0,802 \text{ SIZE} + 0,220 \text{ UP} + 0,045 \text{ NPM} + 0,509 \text{ DK} + e$$

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, besarnya pengaruh 0,802 poin. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Nilai signifikansi $0,018 < 0,05$, besarnya pengaruh 0,509 poin. Karakteristik Perusahaan yakni umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, besarnya pengaruh 0,220 poin. Karakteristik Perusahaan yakni NPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, besarnya pengaruh 0,049 poin.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0,661 ^a	0,620	0,593	0,29167

Sumber : Output SPSS 2023

Hasil uji koefisien determinasi tabel 8 didapat nilai adjusted R-Square 0,593 atau sebesar 59,3%. dapat disimpulkan bahwa variabel dependen ACDI (pengungkapan antikorupsi) dapat dijelaskan oleh variabel independen antara lain ukuran perusahaan, umur perusahaan, nett profit margin dan dewan komisaris sebesar 59,3%, sehingga sisanya sebesar 40,7% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Model F

Tabel 9. Uji F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	0,023	4	0,356	4,630	0,000 ^b
Residual	0,857	95	0,259		
Total	0,880	99			

Sumber : Output SPSS 2023

Hasil SPSS uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi penelitian sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitung sebesar 4,630. disimpulkan bahwa variabel independen (ukuran perusahaan, umur perusahaan, nett profit margin dan dewan komisaris) berpengaruh secara nyata terhadap pengungkapan antikorupsi (ACDI) pada taraf kepercayaan 95%.

Uji Hipotesis t

Tabel 3 Uji Hipotesis

Model	T	Hipotesis
SIZE	3.524	Diterima
UP	4.710	Diterima
NPM	5.032	Diterima
DK	3.350	Diterima

Sumber : Output SPSS 2023

Nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1.98397 maka Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H1 diterima. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H2 diterima. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H3 diterima. NPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi sehingga H4 diterima.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan akan lebih terdorong untuk melakukan praktik pengungkapan anti korupsi Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan investor, sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar agar kredibilitas perusahaan senantiasa terjaga baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Mulyono & Raharja, (2023), Faisal et al., (2022) dan Novalia (2021).

Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aset yang besar, jumlah karyawan yang banyak, penjualan tinggi, dan memiliki struktur kepemilikan yang lengkap. Perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar mempunyai sumber daya lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal. Perusahaan besar dalam melakukan aktifitas bisnisnya akan menimbulkan pengeluaran yang besar dalam rangka mewujudkan legitimasi perusahaan karena informasi yang disampaikan perusahaan lebih luas. Selain itu, ukuran perusahaan menjadi sangat penting karena perusahaan dengan skala besar

biasanya akan lebih dilihat oleh kalangan umum dan menghasilkan banyak tekanan dalam mengungkapkan aspek non-keuangan seperti pengungkapan anti korupsi. Sehingga memotivasi perusahaan untuk lebih melakukan pengungkapan anti korupsi.

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi artinya semakin matang usia perusahaan maka perusahaan akan dituntut lebih profesional dalam mengelola bisnis dan usahanya dengan cara memastikan bahwa di lingkup internal perusahaan tidak melakukan korupsi dan senantiasa meningkatkan pengungkapan anti korupsi kepada pihak eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh Febriansyah, (2020) dan Dewi & Muslih, (2018) yang menyatakan pada perusahaan yang telah berdiri lebih lama memiliki tanggungjawab sosial yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang belum lama berdiri, sehingga perusahaan berusia lebih tua lebih terdorong untuk melakukan aktivitas pengungkapan antikorupsi.

Pengaruh *Nett Profit Margin* Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Nett Profit Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal ini dapat terjadi Ketika perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba dibandingkan penjualan yang lebih besar maka perusahaan akan semakin diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan, maka perusahaan akan mengungkapkan kegiatan anti korupsi yang lebih banyak pula. Perusahaan dengan NPM lebih besar dapat menghasilkan laba bersih yang besar yang bersumber dari dukungan berbagai pihak eksternal, maka perusahaan akan termotivasi untuk mensejahterakan pihak stakeholder dengan menjamin bahwa perusahaan dapat bertanggungjawab terhadap pengelolaan usahanya dengan cara pengungkapan antikorupsi pada annual reportnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Wetik & Andayani, (2015), Yubiharto & Hastuti, (2020).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris akan memicu peningkatan praktik pengungkapan anti korupsi. Dewan komisaris memiliki dampak positif pada pengungkapan sosial perusahaan, termasuk pengungkapan kebijakan antikorupsi. Jumlah yang lebih banyak dari dewan komisaris akan meningkatkan komitmen terhadap kebijakan antikorupsi, pembinaan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis. Semakin signifikan sejumlah dewan komisaris juga memberikan dukungan aktif untuk pelaksanaannya dan kepatuhan terhadap kebijakan etika bisnis, termasuk aktivitas antikorupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tirtasari & Hartomo, (2019), dan Sembiring, (2005) .

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji secara empiris hubungan antara karakteristik perusahaan, dewan komisaris terhadap pengungkapan antikorupsi. Karakteristik perusahaan yang diuji terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan dan net profit margin (NPM). Pengungkapan anti korupsi diukur berdasarkan Indeks anti korupsi yang terdiri dari 7 tema umum dengan 40 sub kategori. Tema umum tersebut adalah 1) pengungkapan akuntansi untuk melawan korupsi/suap 2) tanggung jawab dewan dan manajemen senior 3) pembinaan sumber daya manusia untuk melawan korupsi/suap 4) hubungan bisnis yang bertanggungjawab 5) verifikasi dan jaminan pihak eksternal 6) kode etik 7) kebijakan whistle blowing. Temuan menarik dari penelitian ini adalah karakteristik perusahaan dan dewan komisaris berhubungan dengan pengungkapan anti korupsi. Ukuran perusahaan yang menjadi bagian dari karakteristik perusahaan merupakan faktor penting dalam pengungkapan anti korupsi. Perusahaan dengan visibilitas tinggi seperti perusahaan besar merupakan komitmen yang disoroti oleh masyarakat luas sehingga perusahaan mengungkapkan anti korupsinya kepada masyarakat luas dan pemegang saham.

Umur perusahaan menjadi alat pertimbangan investor dalam melihat apakah suatu perusahaan mampu untuk terus bertahan hidup serta mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan bisnis. Perusahaan yang beroperasi lebih lama memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan kekonstituentannya atas informasi mengenai perusahaan. Oleh karena itu,

perusahaan yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi termasuk pengungkapan anti korupsi. Tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan diukur menggunakan rasio net profit margin (NPM). Semakin tinggi rasio net profit margin menunjukkan semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba. Semakin tinggi npm maka semakin tinggi pula pengungkapan suatu perusahaan.

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan memonitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini berarti bahwa tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan anti korupsi perusahaan semakin besar.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya menggunakan data 2020 dan 2021 saja, hal ini mengakibatkan ukuran sampel yang relatif kecil. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel, sehingga dapat memberikan temuan yang lebih kuat atau hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan faktor faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian dari sisi peraturan, perlu adanya regulasi yang lebih tegas dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mewajibkan pengungkapan anti korupsi dalam laporan tahunan sebagai bentuk upaya perusahaan untuk memotong mata rantai korupsi dari sisi penawaran dan mencegah serta memberantas korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- ACCA. (2008). *Reporting Trilogy A Research On Reporting Disclosures Part I : Anticorruption And Corruption Reporting Disclosures*.
- Andrés, P. de, Polizzi, S., Scannella, E., & Suárez, N. (2021). Corruption-Related Disclosure in the Banking Industry: Evidence From GIPSI Countries. *SSRN Electronic Journal*, May. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3740729>
- Aruan, D. A., Veronica, V., Liandy, C., Christina, D., & Fanny, F. (2021). Pengaruh Kepemilikan Publik, NPM, Pertumbuhan Perusahaan, dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Infrastruktur. *Owner*, 5(2), 556–565. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.455>
- Dewi, R. U., & Muslih, M. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *KAJIAN AKUNTANSI*, 19, 212–220.
- Erawati, T., Ayem, S., & Ayudiyati, P. (2018). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016. *JRA Tirtayasa*, 3.
- Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2022). The content and determinants of CSR anti-corruption disclosure: the case of public-listed companies in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 890–907. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0155>
- Febriansyah, A. R. (2020). *PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*.
- Gunawan, J., & Joseph, C. (2017). *The Institutionalization of Anti-Corruption Practices in Indonesian Companies* (Vol. 12, pp. 147–159). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2043-052320170000012012>
- Hartomo, O. D., & Hutomo, S. H. P. (2020). THE OWNERSHIP STRUCTURE, BOARD OF DIRECTORS, DIVERSIFICATION, AND DISCLOSURE OF ANTI-CORRUPTION POLICIES. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.5660>
- Healy, P., & Serafeim, G. (2016). *AN ANALYSIS OF FIRMS' SELF-REPORTED ANTICORRUPTION EFFORTS*.

- <http://ssrn.com/abstract=2229039>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=2229039>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=2229039>
- Hills, G., Fiske, L., Mahmud, A., & Francisco, S. (2009). *Anti-corruption as Strategic CSR: A call to action for corporations* *Anti-corruption as Strategic CSR: A call to action for corporations About FSG Social Impact Advisors*. http://www.fsg-impact.org/ideas/item/Anti-Corruption_as_Strategic_CSR.htmlwww.fsg-impact.org
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Karim, N. K., Animah, A., & Sasanti, E. E. (2017). Pengungkapan Anti Korupsi Dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar Di Indeks Sri Kehati. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2), 28. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v15i2.5>
- Karim, N. K., Animah, & Sasanti, E. E. (2016). PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN: STUDI KASUS PERUSAHAAN TERDAFTAR DI INDEKS SRI KEHATI. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Koloay, N., Montolalu, J., & Mangindaan, J. V. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2016. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2).
- Krishnamurti, C., Shams, S., & Velayutham, E. (2018). Corporate social responsibility and corruption risk: A global perspective. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.02.002>
- Mudjiyanti, R., & Maulani, S. S. (2017). PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. In *Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI: Vol. XVII (Issue 1)*. www.idx.co.id
- Mulyono, H. A. D., & Raharja, S. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 515. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p16>
- Murwaningsari, E. (2009). *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum*.
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR. *Jurnal Ekonomi*, 22, 1–18.
- Ningsih, Y. I. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPANPENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PADAPERUSAHAANPERDAGANGAN PERIODE 2012-2014 DI BURSA EFEK INDONESIA. *EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business*, 2, 101–115.
- Novalia, I. (2021). *PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH, TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TEDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019*.
- Permanasari, E. W., & Suhardjanto, D. (2014). KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CREDIT RISK. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 215–235.
- Sari, M. P. Y., & Marsono. (2013). CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(3), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sembiring, E. R. (2005). KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL : STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK JAKARTA. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 8*.
- Sembiring, H. (2012). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
JURNAL MEDIASI, 4, 68–77.

- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Sullivan, J. D., Wilson, A., & Nadgrodkiewicz, A. (2013). *The role of corporate governance in fighting corruption*. 1–21.
- Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2019). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17, 2541–5204.
- Wetik, M. M., & Andayani, W. (2015). *PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Studi Empiris Pada Perusahaan Kimia dan Farmasi Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2011-2015*. 1–28.
- Wigrhayani, N. N. S. W., & Sapari. (2019). PENGARUH TIPE INDUSTRI, GROWTH, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI. *KOMPARTEMEN*, XV.
- Yubiharto, & Hastuti, N. R. (2020). PENGARUH ROA, NPM dan DER TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Pada BEI tahun 2014-2018). *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 11, 59–70.
- Yulio, W. S. (2016). PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KOMITE AUDIT, DAN KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP FEE AUDIT. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV, 77–92.
- Zulfi, N. M. (2014). PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH, TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2.